

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 02
TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA
RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHPIDANA TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCURIAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor 91/PID.B/2016/PN. SGM.)



**OLEH
VIDYA NUR FITRAH
B111 13 517**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2017**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN PASCA
DITERBITKANNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 02 TAHUN
2012 TENTANG BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH
DENDA DALAM KUHPIDANA**

(Studi Kasus No. 91/Pid.B/2016/PN.Sgm)

OLEH:

VIDYA NUR FITRAH

B111 13 517

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Pada Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2017

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN PASCA DITERBITKANNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHPIDANA

(Studi Kasus Putusan Nomor: 91/Pid.B/2016/PNSgm)

Disusun dan diajukan oleh:

VIDYA NUR FITRAH

B111 13 517

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Rabu 1 Maret 2017
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H., DFM
NIP. 19680411 1999203 1 003

Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.
NIP. 19620618 198903 1 002

**A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Pengembangan**

Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

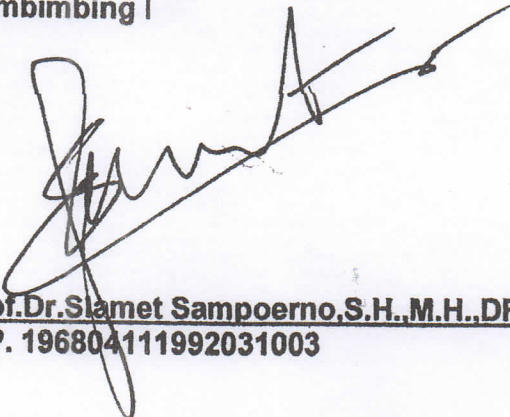
Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Vidya Nur Fitrah
Nomor Induk : B111 13 517
Bagian : Hukum Pidana
Judul : **TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN PASCA DITERBITKANNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 2 TAHUN 2012 TENTANG BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMAH DENDA DALAM KUHPIDANA (studi kasus No. 91/Pid.B/2016/PN.Sgm)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

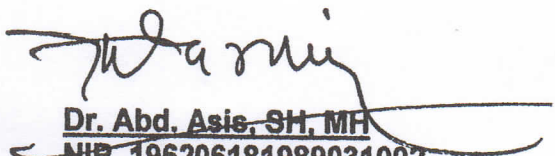
Makassar, Februari 2017

Pembimbing I

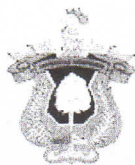


Prof. Dr. Slamet Sampoerno, S.H., M.H., DFM
NIP. 196804111992031003

Pembimbing II



Dr. Abd. Asis, SH, MH
NIP. 196206181989031002



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : VIDYA NUR FITRAH
Nomor Pokok : B11113517
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Pasca Diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 2012 Tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHPidana (Studi Kasus No.91/Pid.B/2016/PN.Sgm)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2017

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan,

Prof. Dr. Ahmadi Miru,SH.,MH
NIP. 19610607 198601 1 003

ABSTRAK

VIDYA NUR FITRAH, B11113517, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Pasca Diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHPidana (Studi Kasus Putusan Nomor 91/Pid.B/2016/PN.SGM), dibawah bimbingan **Bapak Prof.Dr.Slamet Sampoerno, S.H.,M.H.,DFM** selaku pembimbing I dan **Bapak Dr.Abd. Asis, S.H, M.H** selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk Mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pencurian pasca diterbitkannya Peraturan MARI No.2 tahun 2012 tentang batas penyelesaian tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHPidana dalam perkara Nomor 91/Pid.B/2016/PN. Sgm. Dan Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana pencurian pasca diterbitkannya Peraturan MARI No.2 tahun 2012 tentang batas penyelesaian tindak pidana

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Sungguminasa Gowa dengan melakukan wawancara langsung dengan hakim yang memutuskan perkara pencurian ini serta mengambil salinan putusan yang terkait dengan pemecahan masalah tindak pidana pencurian. Disamping itu, peneliti juga melakukan studi kepustakaan dengan cara menelaah buku-buku, literature, dan peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan dibahas dalam skripsi penulis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Penerapan hukum pidana Pasal 362 terhadap tindak pidana materiil pada putusan No. 91/Pid.B/2016/PN.SGM tentang pencurian biasa penulis nilai kurang tepat mengingat fakta-fakta dipersidangan menunjukkan adanya unsur meringankan yaitu perbuatan terdakwa jika ditaksir kerugiannya hanya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan jumlah batasan tindak pidana yang telah di perbarui oleh peraturan MARI yaitu dari Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) dilipatgandakan menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), selain itu terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatannya dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang ada rumahnya. 2). Pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan No. 91/Pid.B/2016/PN.SGM dinilai penulis kurang tepat karena Hakim tidak mempertimbangkan hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu jika ditaksir kerugian korban hanya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan jumlah batasan tindak pidana yang telah di perbarui oleh peraturan MARI yaitu dari Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) dilipatgandakan menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Yang seharusnya terdakwa dipidana dan diputus Pasal 364 pencurian ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya 3 bulan.

Kata Kunci : Pencurian, Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirahiim

Assalamu' Alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHPidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Putusan Nomor 91/PID.B/2016/PN. SGM.)”** sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Salam dan shalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang dan menjadi teladan bagi seluruh umat manusia.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menghaturkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Drs. H. Chairul A.Tau M.Si dan Ibunda Hj. Sri Pudji Chairul A.Tau yang telah membesarkan penulis dan memberikan banyak dukungan, kasih sayang, pelajaran, serta doa kepada penulis. Juga kepada saudara-saudari penulis Gine Nur Islamiah S.Sos,

Pangeran Nur Akbar S.STP, dan Sarah Nur Ikhlas S.KM yang telah memberikan banyak masukan, dan dorongan untuk menggapai cita-cita.

Penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis, maka penulis ingin menghaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta segenap jajaran struktural di Rektorat Universitas Hasanuddin;
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patitinggi, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof Ahmadi Miru, S.H., M.H., selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan Bapak Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana beserta Dosen di Departemen Hukum Pidana
4. Bapak Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H., DFM. Selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Abd. Asis, S.H., M.H. selaku pembimbing II atas bimbingan dan pelajarannya;

5. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H, Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H., Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H., selaku tim penguji atas kritik dan sarannya yang mebangun untuk penulis;
6. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama perkuliahan;
7. Seluruh Staf Akademik dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
8. Ketua Pengadilan Negeri Gowa beserta jajarannya dan Kepala Kejaksaan Negeri Gowa atas bantuan yang diberikan kepada penulis selama proses penelitian;
9. Sahabat – sahabat tercinta dan seperjuangan, Nurul Saraswati Ahmad, Maudy Aqmarina, Nurhidayah, Rizky Dwi Putri, Ade Apriani Syarif, Andi Putri Rasyid, Mita Myawati, Nisrina Qalbi, Nurul Fahmy, Dhea Azzahrah, semoga gelar yang kita dapatkan menjadi berkah untuk kita semua, see you on top!
10. Keluarga juga teman yang setia memberikan dukungan dan semangat, Nur Al Aina, Sri Hartati Indah, Yuni Trisna Shari, Rizky Diah Permata Sari, Nurul Annisa, Emhy Maharani, Oryza Sativa, Echatriadi;

11. Teman-teman seperjuangan selama KKN Gel. 93 Kabupaten Bantaeng, Kecamatan Sinoa, desa Bonto Bulaeng;
12. Teman-Teman Asas 2013 Fakultas Hukum Universita Hasanuddin
13. Keluarga Besar Hasanuddin Law Study Center (HLSC) khususnya Tashan Muh Akram N atas bantuan dan dukungannya dalam mendampingi penulis menyelesaikan skripsi ini;
14. Dan Terima Kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis baik dalam perkuliahan sampai penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penulisan ini penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, masih terdapat kekurangan karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan penulisan skripsi ini.

Makassar, Maret 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	6
C. Tujuan penelitian.....	6
D. Kegunaan penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. TINDAK PIDANA.....	8
1. Pengertian tindak pidana.....	8
2. Unsur-unsur tindak pidana.....	10
3. Jenis-jenis tindak pidana.....	12
B. TINDAK PIDANA PENCURIAN.....	15
1. Pengertian tindak pidana pencurian.....	15
2. Unsur-unsur tindak pidana pencurian.....	16
3. Jenis-jenis tindak pidana pencurian.....	18
C. PIDANA DAN PEMIDANAAN.....	21
1. Pengertian pidana.....	22
2. Pidana.....	22
3. Bentuk-bentuk pidana.....	25
4. Alasan yang Meringankan dan Memberatkan.....	29

D. PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP.....	30
BAB III METODE DAN LOKASI PENELITIAN.....	31
A. Lokasi penelitian.....	31
B. Jenis dan sumber data	31
C. Teknik pengumpulan data.....	31
D. Analisis data.....	32
BAB IV PEMBAHASAN.....	33
A. Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana materiil pencurian pasca diterbitkannya peraturan MARI No. 2 tahun 2012 tentang batas penyelesaian tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHPidana dalam perkara Nomor:91/Pid.B/2016/PN.Sgm.....	33
1. Identitas Terdakwa.....	33
2. Posisi Kasus.....	33
3. Dakwaan Penuntut Umum.....	35
4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	38
5. AmarPutusan.....	39
6. Analisa Penulis.....	40
B. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan pidana perkara putusan Nomor: 91/Pid.B/2016/PN.Sgm. pasca dikeluarkannya peraturan MARI No. 2 tahun 2012 tentang batas penyelesaian tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHPidana.....	43
1. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana.....	43
2. Analisa Penulis.....	53
BAB V PENUTUP.....	57
A. KESIMPULAN.....	57
B. SARAN.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang berbentuk Republik. Tujuan Negara Indonesia secara jelas tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD NKRI 1945) bahwa Negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam usaha perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sehubungan dengan tujuan Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat NRI), maka sudah seharusnya masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan. Berdasarkan UUD NKRI Indonesia tahun 1945 amandemen ke empat Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hukum adalah sebuah entitas yang sangat kompleks, meliputi kenyataan kemasyarakatan yang majemuk, mempunyai banyak aspek, dimensi, dan fase¹. Dalam ilmu pengetahuan hukum, secara teoritis hukum yang baik harus memenuhi unsur sosiologis, yuridis, dan filosofis. Demikian juga dengan undang-undang (selanjutnya

¹Imam Syaukani, A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar politik hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 1

disingkat uu) materiil, bila pembuatannya mengesampingkan salah satu, maka dalam penerapannya akan memenuhi kendala di tengah-tengah masyarakat².

Berangkat dari masalah kompleksitas hukum tersebut terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi masalah kompleksitas hukum tersebut, salah satunya adalah perkembangan yang sedang terjadi di NRI. Berdasarkan Pancasila sila ke-4 yang berbunyi “Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia”, kini Negara kita sedang dalam tahap perkembangan untuk pemenuhan kesejahteraan rakyat Indonesia. Masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian menengah keatas dan kondisi keamanan yang harmonis. Hal tersebut dapat tercapai dengan cara setiap masyarakat berperilaku serasi dengan kepentingan dan norma yang berlaku dimasyarakat. Norma adalah anggapan bagaimana seseorang harus berbuat atau tidak harus berbuat. Istilah norma mengandung arti adanya unsur apa yang “seharusnya”, apa yang diharapkan (yang patut) atau yang tidak diharapkan (yang tidak patut). Dibelakang norma terdapat nilai (*value*). Nilai yang merupakan dasar bagi norma. Nilai dapat diartikan sebagai ukuran yang disadari atau tidak disadari oleh suatu masyarakat atau golongan untuk menetapkan apa yang benar, yang baik, dan sebagainya. Nilai mempegaruhi tindak-laku orang³.

² Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm 1

³ Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm 19-20

Namun belakangan ini, dengan terjadinya krisis moneter yang berpengaruh besar terhadap masyarakat yang mengakibatkan masyarakat Indonesia mengalami krisis moral. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya kejahatan dan meningkatnya pengangguran sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah cenderung untuk tidak memperdulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Melihat kondisi ini untuk memenuhi kebutuhan, ada kecenderungan menghalalkan segala cara agar kebutuhannya dapat terpenuhi, salah satunya dengan cara yang melanggar norma hukum.

Pencurian merupakan salah satu tindak kejahatan yang paling sering terjadi di masyarakat dimana keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan cara mencuri. Dari media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringnya terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. Setiap orang akan memenuhi kebutuhan batiniah mereka dengan berbagai cara agar mereka dapat bertahan hidup. Cara yang paling mudah dan paling cepat adalah dengan cara mengambil barang atau mencuri sejumlah dari orang lain yang bukan haknya. Inilah mengapa mencuri dijadikan alternatif pemenuhan kebutuhan secara singkat.

Dewasa ini di Indonesia sedang berlangsung usaha untuk memperbarui Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat

KUHPidana) maka sebagai bagian dari usaha pembaharuan itu dilakukan, tidak hanya karena alasan bahwa KUHPidana yang sekarang ini diberlakukan dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan masyarakat, tetapi juga karena KUHPidana tersebut tidak lebih dari produk warisan Belanda, dan karenanya tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat⁴.

Pencurian diatur pada Pasal 362-367 KUHPidana yang telah diklasifikasikan menjadi beberapa jenis pencurian, mulai dari kejahatan pencurian biasa (Pasal 362 KUHPidana), kejahatan pencurian ringan (Pasal 364 KUHPidana), kejahatan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHPidana), kejahatan pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHPidana), kejahatan pencurian di dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHPidana).

Terdapat unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam rumusan tersebut agar seseorang dapat dituntut sebagai pencuri. Unsur-unsur tersebut ada yang berbentuk objektif dan subjektif. Dalam KUHPidana ditentukan perbuatan-perbuatan apa saja, kapan, dan dengan cara bagaimana. Juga menentukan ancaman yang akan dijatuhkan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana yang dinamakan sanksi atau hukuman atau pidana. Seiring dengan berjalannya waktu tindak pidana pencurian kini menjadi tindak pidana yang paling sering terjadi, baik pencurian ringan

⁴ Jimly Asshidiqqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Angkasa, Bandung, 1996, hlm 1

maupun pencurian dengan pemberatan. Pencurian ringan atau pencurian dengan nilai kecil yang kini diadili di pengadilan cukup menyita perhatian masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan hukuman 5 (lima tahun penjara sebagaimana diatur pada Pasal 362 KUHPidana oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disingkat DPR) perlu melakukan perubahan atas KUHPidana, khususnya terhadap seluruh nilai rupiah dalam KUHPidana. Namun, mengingat seperti hal tersebut memakan waktu proses yang cukup lama maka Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disingkat MARI) memandang perlu menerbitkan Peraturan MARI untuk menyesuaikan nilai uang yang menjadi batasan tindak pidana ringan. Maka diterbitkanlah Peraturan MARI Nomor: 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana.

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang penerapan hukum hakim dan pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pencurian pasca diterbitkannya Peraturan MARI Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana. Untuk itu penulis mengangkat skripsi dengan judul “Tinjauan yuridis tindak pidana pencurian pasca diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung nomor 02 tahun 2012

tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana (studi kasus putusan nomor 91/Pid.B/2016/pn. Sgm.)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana materiil pencurian pasca diterbitkannya Peraturan MARI No. 2 tahun 2012 tentang batas penyelesaian tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHPidana dalam perkara Putusan Nomor: 91/Pid.B/2016/PN.Sgm.?
2. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan pidana perkara Pasca dikeluarkannya Peraturan MARI No.2 tahun 2012 tentang batas penyelesaian tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHPidana dalam perkara Putusan Nomor: 91/Pid.B/2016/PN.Sgm.?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pencurian pasca diterbitkannya Peraturan MARI No.2 tahun 2012 tentang batas penyelesaian tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHPidana dalam perkara Nomor 91/Pid.B/2016/PN. Sgm.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana pencurian pasca diterbitkannya Peraturan MARI No.2 tahun 2012 tentang batas penyelesaian tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHPidana dalam perkara Nomor Nomor 91/Pid.B/2016/PN.Sgm.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Dapat dijadikan sebagai bahan kepustakaan dan bahan referensi hukum bagi mereka yang berminat pada kajian-kajian ilmu hukum pada umumnya.
2. Dapat memberikan penjelasan kepada instansi-instansi terkait, serta masyarakat pada umumnya, tentang ketentuan-ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang tindak pidana pencurian pasca diterbitkannya peraturan MARI Nomor. 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Berdasarkan KUHPidana dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustaaan tentang hukum pidana sering mempergunaan istilah *delik*, sedangkan pembuat uu mempergunaan istilah pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁵ Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah Tindak Pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah⁶:

- 1) *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
- 2) *Strafbare Handlug* diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
- 3) *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal.

⁵Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta hlm 62

⁶ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012 hlm 19

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata yaitu *straf* (pidana dan hukum), *baar* (dapat dan boleh), *feit* (tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan).

Jadi istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana⁷. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh uu (pidana). Disamping istilah tindak pidana, ada istilah lain yang dipakai oleh beberapa sarjana, yaitu⁸:

- Simons mengemukakan bahwa, “perbuatan salah dan melawan hukum dan diancam pidana dan dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan”
- Moeljatno mengemukakan bahwa “perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu”⁹.
- E.Utrecht menganjurkan pemakaian istilah peristiwa pidana, karena peristiwa ini meliputi suatu perbuatan (*handelen* atau *doen positief*) atau melalaikan (*verzuim* atau *nalaten* atau *niet-doen*, *negative* maupun akibatnya)¹⁰

Berikut beberapa pengertian tindak pidana menurut para ahli:

- 1) Wiryono Projodikoro mengemukakan bahwa, “tindak pidana berarti suatu perbuatan yang berlakunya dapat dikenakan

⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm 72

⁸ *ibid*

⁹ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-pokok hukum Pidana*, stori Grafika, Jakarta, 2002, hal 204

¹⁰ Wiryono Projodikoro (b), *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT.ERESCO, Jakarta, 2002, hal 207

hukum pidana dan berlakunya ini dapat dikenakan subjek pidana.”¹¹

- 2) Bambang Poernomo mengemukakan bahwa, “perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”¹²
- 3) Simons mengemukakan bahwa, “tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh uu, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab”¹³.

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum, dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Untuk dikatakan tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan uu. Menurut Lamintang bahwa setiap tindak pidana dalam KUHPidana pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif¹⁴.

¹¹ Ibid, hal 50

¹² Poernomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm 130

¹³ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 97

¹⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010 hlm 79

a. Unsur Objektif

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.

b. Unsur Subjektif

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh uu. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).

Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Berikut beberapa unsur tindak pidana menurut para ahli¹⁵:

- 1) Moeljatno:
 - a. Perbuatan;
 - b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
 - c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)
- 2) R.Tresna:
 - a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
 - b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. Diadakan tindakan penghukuman
- 3) Vos:
 - a. Kelakuan manusia;
 - b. Diancam dengan pidana;
 - c. Dalam peraturan perundang-undangan
- 4) Jonkers:
 - a. Perbuatan (yang);
 - b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
 - c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
 - d. Dipertanggungjawabkan.
- 5) Unsur tindak pidana dalam KUHPidana yaitu:
 - a. Unsur tingkah laku;
 - b. Unsur melawan hukum;
 - c. Unsur kesalahan;
 - d. Unsur akibat konstitutif;
 - e. Unsur keadaan yang menyertai;
 - f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
 - g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
 - h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
 - i. Unsur objek hukum tindak pidana;
 - j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
 - k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

¹⁵ *ibid*

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut¹⁶:

- 1) Menurut sistem KUHPidana, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman pidana penjara.
- 2) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dari dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut.
- 3) Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung *culpa*.
- 4) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHPidana adalah tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif

¹⁶Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, (PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012) hlm 28-34

murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

- 5) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika, dimana terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus dimana tindak pidana tersebut berlangsung lama yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus.
- 6) Berdasarkan sumbernya dapat dibedakan menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHPidana sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku I dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHPidana.
- 7) Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu). Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nahkoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.
- 8) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan disini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap perbuatannya, tidak disyaratkan adanya pengaduan yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.
- 9) Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak

pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan. Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:

- a. Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
- b. Dalam bentuk yang diperberat; dan
- c. Dalam bentuk ringan

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

- 10) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan. Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHPidana didasarkan pada kepentingan hukum. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam buku II KUHPidana. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan Negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab I KUHPidana), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum (Bab VIII KUHPidana), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII KUHPidana), penggelapan (Bab XXIV KUHPidana), pemerasan dan pengancaman (Bab XXIII KUHPidana) dan seterusnya.
- 11) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidanya pelakucukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHPidana adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidanya pelaku. Disyaratkan dilakukan secara berulang.

B. Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Pengertian pencurian dalam bentuk pokok menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHPidana yang mengatur¹⁷:

“Barang siapa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, dihukum selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900 (Sembilan ratus rupiah)”

Melihat rumusan pasal tersebut dapat kita simpulkan bahwa tindak pidana pencurian merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini perbuatan yang diartikan “mengambil”

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian

Pasal 362 merupakan bentuk pokok dari pencurian dengan unsur-unsur sebagai berikut:

2.1. Mengambil

Unsur mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah ke kuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan

¹⁷H.A.K. MOCH ANWAR (DADING), *Hukum pidana bagian khusus (ku buku II) jilid I*, penerbit alumni, Bandung, 1986, hlm 17

dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil harus dilihat dari kasus yang dihadapi sesuai dengan perkembangan masyarakat.

2.2. Barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain

Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi objek pencurian. Barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian, yaitu barang-barang dalam keadaan *res nullius* dan *res derelictae*.

2.3. Dengan maksud untuk dimiliki bagi diri sendiri secara melawan hukum

Dengan maksud untuk memiliki barang bagi diri sendiri secara melawan hukum dengan maksud. Istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan, atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum.

a. Melawan hukum

Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.

b. Memiliki barang bagi diri sendiri

Memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. Setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik, sedangkan ia bukan pemilik. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang.

3. Jenis-jenis tindak pidana pencurian

1. Berdasarkan kitab KUHPidana, tindak pidana pencurian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu¹⁸:

a. Pencurian Biasa (Pasal 362)

Pencurian Biasa merupakan bentuk pencurian yang pokok. Pencurian termasuk kejahatan terhadap harta kekayaan yang unsurnya-unsurnya adalah mengambil barang orang lain, sebagian atau menyeluruh, pengambilan barang tersebut dengan tujuan untuk memiliki, perbuatan mengambil itu dilakukan secara melawan hukum.

b. Pencurian Berat (Pasal 363)

Dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun:

Ke-1: Pencurian Ternak;

Ke-2: Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karena terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;

Ke-3: Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauan yang berhak;

Ke-4: Pencurian dilakukan oleh 2 orang atau lebih bersama sama;

Ke-5: Pencurian yang dilakukan untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat atau memakai

¹⁸ R.Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1984, hlm 126

anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian-jabatan palsu.

Jika pencurian yang diterapkan dalam nomor 3 disertai dengan salah satu hal tersebut dalam No.4 dan 5, maka dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun.

Perumusan pasal 363 (1) menunjukkan pencurian dalam bentuk pokok sebagaimana dirumuskan dalam pasal 362 berhubung hanya disebut nama kejahatannya saja yaitu pencurian, ditambah unsur lain yang memberatkan. Pencurian yang dirumuskan dalam pasal 363 disebut pencurian berat¹⁹.

c. Pencurian Ringan (Pasal 364)

Berdasarkan KUHPidana pencurian ringan yang dimaksudkan adalah:

- a) Apabila harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.250,
- b) Pencurian dilakukan dua orang atau lebih (Pasal 363 ayat (1) sub 5 KUHPidana), asal harga barang tidak boleh lebih dari Rp.250, dan
- c) Pencurian dengan masuk tempat kejahatan atau mencapai barang yang dicuri dengan jalan membongkar, memecah, memanjat, kunci palsu dan sebagainya (Pasal 363 ayat (1) sub 5 KUHPidana), asal :
 - 1) Harga barang tidak lebih dari Rp. 250 dan
 - 2) Tidak dilakukan dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

¹⁹H.A.K. MOCH ANWAR (DADING), *Hukum pidana bagian khusus (kuhp buku II) jilid I*, penerbit alumni, Bandung, 1986 hlm 19-20

d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365)

Pencurian dengan kekerasan yaitu pencurian yang didahului, disertai atau diiringi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang-orang dengan tujuan untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau pada keadaan tertangkap tangan supaya mempunyai kesempatan bagi diri sendiri atau orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu, untuk melarikan diri supaya barang yang dicuri tetap dalam kekuasaannya.

e. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367)

Berdasarkan Pasal 367, pencurian dalam keluarga yaitu:

- a) Pencurian atau membantu pada pencuri atas kerugian suami atau isteri sendiri tidak dihukum, oleh karena orang-orang itu sama-sama memiliki harta benda suami isteri. Bagi mereka yang tunduk pada peraturan kawin menurut sipil (B.W.), dimana berlaku peraturan tentang “cerai meja-makan tempat-tidur” yang berarti, perkawinan mereka masih tetap, akan tetapi hanya kewajiban mereka untuk bersama-sama tinggal dalam satu rumah saja yang ditiadakan, jika ada pencurian terjadi atas kerugian suami atau isteri sendiri yang telah bercerai menja-makan itu, hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari suami/isteri yang dirugikan (delik aduan);
- b) Pencurian atau membantu pencurian oleh keluarga sedarah atau keluarga karena perkawinan turunan lurus (tidak terbatas berapa derajat), misalnya : cucu, anak, bapak/ibu, kakek/nenek, cucu-menantu, anak-menantu, bapak/ibu mertua, kakek/nenek mertu dan sebagainya, atau keluarga sedarah atau keluarga karena perkawinan turunan menyimpang dalam dua derajat, misalnya : saudara laki-laki dan saudara perempuan, ipar laki-laki dan ipar perempuan, dari yang mempunyai barang, hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang mempunyai barang yang dicuri itu (delik aduan)

- c) Jika menurut adat istiadat keturunan ibu (*matriarchat*) kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain pada bapak kandung, maka peraturan tentang pencurian dalam kalangan keluarga tersebut pada Pasal 367 (2) KUHPidana berlaku pula pada orang itu, misalnya : seorang kemenakan yang mencuri harta-benda ibunya (adat minang-kabau) itu adalah delik aduan²⁰.

C. Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian pidana

Pidana mengandung tata nilai (value) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang²¹. Pidana apada hakikatnya adalah suatu kerugian berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh Negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhdap hukum²². Pidana adalah sanksi yang hanya ada dalam hukum pidana. Jika dikaitkan dengan sanksi dalam bidang hukum lain, maka pidana adalah sanksi yang paling keras. Dalam lapangan hukum pidana sanksi yang terberat berupa pidana badan, pidana atas kemerdekaan, bahkan pidana jiwa.²³

²⁰R.Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1984, hlm 123, 129-130

²¹ M.Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 55

²² Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2014hlm 385

²³Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, (PT. Refika Aditama, Bandung, 2011), hlm 139

2. Pemidanaan

a. Pengertian Pemidanaan

Menurut *Wesley Cragg* ada empat hal yang terkait pemidanaan dalam masyarakat modern yaitu²⁴:

- a) Pemidanaan adalah sesuatu yang dapat dimengerti dan tidak dapat dihindari dalam masyarakat modern,
- b) Pelaksanaan pemidanaan adalah refleksi system peradilan pidana yang berevolusi dan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan tidak terlepas dari tipe dan karakter perbuatan pidana yang dilakukan, tegasnya ada hubungan yang erat antara perbuatan itu sendiri.
- c) Pelaksanaan pidana harus mengalami reformasi yang signifikan dengan merujuk pada pelaksanaan pidana di Eropa Barat dan Amerika Utara.
- d) Sejumlah pemidanaan yang digunakan harus menyediakan kriteria untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan pidana tersebut sudah sesuai dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Apakah pemidanaan yang diterapkan perlu direformasi menuju perbaikan.

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “Pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan ‘Pemidanaan’ diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, dan juga masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori

²⁴ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, (Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2014), hlm 385-386

konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan yang serupa.

b. Teori Pemidanaan

Alasan pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok, yaitu sebagai golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan kemudian ditambah dengan golongan teori gabungan²⁵.

1) Teori Pembalasan

Teori Pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Penganjur teori ini antara lain Immanuel Kant yang mengatakan “*Fiat justitia ruat coelom*” (walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya). Teori pembalasan pembalasan ini terbagi dalam dua macam, yaitu:

- a. Teori pembalasan yang obyektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencan atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pembuat kejahatan.

²⁵Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, (PT. Refika Aditama, Bandung, 2011), hlm 141-144

b. Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

2) Teori Tujuan

Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Penganjur teori ini antara lain Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat.

3) Teori Gabungan

Kemudian timbul golongan ketiga yang mendasarkan pemidanaan kepada perpaduan teori pembalasan dengan teori tujuan, yang disebut sebagai teori gabungan. Dasar pemikiran teori gabungan adalah bahwa pemidanaan bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan datang, karenanya pemidanaan harus dapat memberi kepuasan bagi hakim, penjahat itu sendiri maupun kepada masyarakat. Teori gabungan ini mengutamakan perhatiannya kepada si pelaku

tindak pidana, bukan pada tindak pidana yang telah dilakukan. Pidana ini didasarkan pada berat dan ringannya tindak pidana yang dilakukan, melainkan harus didasarkan pada keperluan yang dibutuhkan untuk dapat memperbaiki si pelaku tindak pidana. Menurut teori ini, tujuan pidana untuk mengubah tingkah laku dan kepribadian si pelaku tindak pidana agar ia meninggalkan kebiasaan jelek yang bertentangan dengan norma yang berlaku. Dengan kata lain adalah untuk memperbaiki pelaku tindak pidana. Teori inilah yang dianut oleh rancangan KUHPidana.

3. Bentuk-bentuk Pidana

3.1. Pidana Pokok

Berdasarkan pasal 10 KUHPidana pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Urut-urutan pidana pokok tersebut berdasarkan tingkatan berat-ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan. Prinsip umum dalam penjatuhan pidana pokok berdasarkan KUHPidana adalah hakim dilarang menjatuhkan lebih dari satu pidana pokok. Oleh karena itu ancaman pidana dalam KUHPidana pada umumnya bersifat alternative antara pidana penjara dan pidana denda²⁶.

²⁶ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, (Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2014) hlm 387

1. Pidana Mati

Sebagaimana pasal 11 KUHPidana yang berbunyi:

“Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri”²⁷

Hukuman mati adalah hukuman terberat. Berdasarkan pasal 11 KUHPidana, hukuman mati yang demikian dianggap tidak manusiawi sehingga diterbitkan uu nomor 5 Tahun 1969 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan umum Dan Militer. Berdasarkan uu tersebut, pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan tembak mati dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan pada pengadilan tingkat pertama.

2. Pidana penjara

Pidana penjara adalah merupakan pidana yang paling banyak dimuat dalam KUHPidana dan ketentuan pidana lainnya. Pidana penjara adalah pidana berupa pembatasan kemerdekaan bagi pelaku tindak pidana ke dalam suatu rumah penjara. Diharapkan, dengan adanya perampasan kemerdekaan si terpidana akan menjadi tidak bebas untuk mengulangi tindak pidana dan selama waktu dirampasnya kemerdekaan itu, si terpidana juga diharapkan melakukan

²⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Politeia, Bogor, 1995), hlm 36

perenungan untuk menyadari kesalahan yang telah dibuatnya²⁸.

3. Pidana Kurungan

Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan mengurung orang tersebut di dalam sebuah lembaga Pemasyarakatan.

Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, lama hukuman pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun, sebagai mana telah dinyatakan dalam pasal 18 KUHPidana²⁹.

4. Pidana Denda

Salah satu alasan adanya pidana denda karena keberatan terhadap pidana badan dalam jangka waktu singkat. Beberapa keuntungan pidana denda adalah: pertama, pidana denda tidak menyebabkan stigmatisasi. Kedua, pelaku yang dikenakan pidana denda dapat tetap tinggal bersama keluarga dan lingkungan sosialnya.

²⁸Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, (PT. Refika Aditama, Bandung, 2011), hlm 146

²⁹Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, (PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012) hlm 52

Ketiga, pidana denda tidak menyebabkan pelaku kehilangan pekerjaan. Keempat, pidana denda dengan mudah dapat dieksekusi. Kelima, Negara tidak menderita kerugian akibat penjatuhan pidana denda. Namun demikian terdapat sisi lemah dari pidana denda yang hanya menguntungkan bagi orang-orang yang memiliki kemampuan finansial lebih³⁰.

3.2. Pidana Tutupan

Pidana tutupan dalam konteks hukum pidana Indonesia adalah berdasarkan uu nomor 20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan. Pidana Tutupan ditujukan bagi pelaku kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, namun motivasi dalam melakukan kejahatan tersebut patut dihormati. Dapatlah dikatakan bahwa pidana tutupan diperuntukkan bagi pelaku kejahatan politik. Terpidana yang menjalani pidana tutupan, wajib menjalankan pekerjaan. Demikian pula semua peraturan yang terkait pidana penjara juga berlaku bagi pidana tutupan³¹.

3.3. Pidana Tambahan

Berdasarkan KUHPidana, pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang dan

³⁰Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, (Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2014), hlm 401

³¹ Ibid, hlm 402

pengumuman putusan hakim. Akan tetapi di luar KUHPidana, terdapat banyak pidana tambahan yang berbeda dengan apa yang dicantumkan dalam KUHPidana. Hal ini tertuang dalam uu pidana khusus, baik uu pidana maupun yang bukan uu pidana³². Pidana tambahan bersifat preventif, ia juga bersifat sangat khusus sehingga sering sifat pidananya hilang dan sifat preventif inilah yang menonjol. Pidana tambahan pun sering termasuk dalam kemungkinan mendapat grasi.

4. Alasan yang Meringankan dan Memberatkan

Peringanan dan pemberatan pidana sebenarnya terkait dengan prinsip pertanggungjawaban pidana. Dasar pengurangan pidana diatur dalam Pasal 47 KUHPidana seperti³³:

- a) Karena usia belum dewasa;
- b) Percobaan melakukan kejahatan (pasal 53 KUHPidana)
- c) Perbantuan Kejahatan (Pasal 57)

Sedangkan pemberatan pidana dapat dilakukan karena:

- a) Seorang pelaku adalah pegawai negeri
- b) Melakukan kejahatan dengan menggunakan bendera kebangsaan
- c) Karena pengulangan
- d) Karena perbarengan
- e) Karena keadaan tertentu lainnya yang secara khusus ditentukan dalam beberapa pasal tindak pidana
- f) Karena beberapakeadaan yang juga menjadi asas umum bagi suatu ketentuan hukum pidana khusus.

³² ibid

³³Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (PT.Refika Aditama, Bandung, 2011), hlm 157

D. Peraturan MARI No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHPidana

Pada BAB I Peraturan MARI No. 2 Tahun 2012, yang terdiri dari 2 pasal yang berisi perubahan kata “dua ratus lima puluh ribu rupiah” dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHPidana dibaca menjadi Rp. 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian dijelaskan pula bahwa apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp.2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ketua pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP.

Pada BAB II membahas soal denda yang tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHPidana kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, dilipat gandakan menjadi 1.000 (seribu) kali³⁴.

³⁴http://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/perma-no-2-tahun-2012-tentang-penyesuaian-batasan-tindak-pidana-ringan-dan-jumlah-denda-dalam-kuhp.pdf, diakses pada 7 Oktober 2016

BAB III

METODE DAN LOKASI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di instansi atau lembaga Pengadilan Negeri Gowa dan Kejaksaan Gowa, dengan pertimbangan bahwa, merupakan tempat diputuskannya perkara pidana dengan putusan nomor 91/Pid.B/2016/PN. Sgm.

B. Jenis dan Sumber Data

Data pendukung dalam penelitian ilmiah yang penulis lakukan terdiri atas 2 (dua) jenis data, yakni:

- a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti sebagai obyek penulisan yaitu wawancara langsung di Pengadilan Negeri Makassar dan Kejaksaan Negeri Gowa
- b. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh peneliti berupa sumber-sumber tertentu seperti catatan, laporan historis, maupun arsip yang diperoleh peneliti dari Pengadilan Negeri Makassar dan Kejaksaan Negeri Gowa.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik berdasarkan metode penelitian lapangan (field research) yang diperoleh dengan cara wawancara (interview) secara langsung

kepada hakim yang memutus perkara tersebut , dan penelitian kepustakaan (library research) yang diperoleh dengan cara mengumpulkan berbagai data pustaka diperoleh berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku, literatur-literatur, perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder diolah terlebih dahulu kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana materiil pencurian pasca diterbitkannya peraturan MARI No. 2 tahun 2012 tentang batas penyelesaian tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHPidana dalam perkara Nomor: 91/Pid.B/2016/PN. Sgm.

1. Identitas Terdakwa

Nama	: Galang Listiyanto Jaya Bin Irawan Jaya
Tempat Lahir	: Gowa
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan Alternatif I, Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SMP tidak tamat

2. Posisi Kasus

Berikut ini adalah uraian mengenai posisi kasus dalam putusan No. 91/Pid.B/2016/PN.Sgm yaitu sebagai berikut :

Terdakwa Galang Listiyanto Bin Irwan Jaya pada hari senin tanggal 08 Februari tahun 2016, bertempat di Komp. Induk

Minasa Maupa Kel. Tompobalang Kec. Sombaopu Kab. Gowa atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika terdakwa galang listiyanto jaya bin irwan jaya sekitar jam 07.00 wita berjualan ayam potong milik Amhar kemudian sekitar jam 21.00 wita terdakwa istirahat dan langsung menuju ke tempat penjualan / lapak milik saksi korban hasni binti h.tanri yang terletak di basement pasar minasa maupa selanjutnya terdakwa membuka terpal penutup lapak tersebut dan mengambil barang milik saksi korban tanpa ijin yaitu 2 (dua) bungkus coklat batang seberat 2 (dua) kg, 2 (dua) bungkus coklat batang seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) Kg, 12 (dua belas) agar-agar merk burung wallet. Saksi Hendrawan dg tula bin marhaban dg nyomba yang berada dirumahnya di sms oleh saksi ramli dg Gollo bin Rahman dg lewa bahwa terdakwa berada di basement sedang mengambil barang jualan milik saksi korban kemudian saksi Ramli menuju ke pasar minasa maupa, pada saat saksi

Hendrawan berada dipasar tersebut kemudian bertemu dengan saksi ramli dan saksi nasir yang berada di pos keamanan selanjutnya mereka bertiga ke basement dan melihat terdakwa sedang mengambil barang jualan milik saksi korban kemudian langsung menangkap terdakwa untuk diamankan di pos keamanan beserta barang milik saksi korban yang terdakwa sudah ambil selanjutnya datang anggota kepolisian dan membawa terdakwa ke resort Gowa. Selanjutnya, saksi korban Hasni binti H. Tanri diberitahukan oleh Sitti Fatimah bahwa barang-barang saksi korban yang berada dilapaknya telah diambil oleh terdakwa Galang Listianto bin Irwan Jaya dimana Sitti Fatimah diberitahukan melalui telepon oleh petugas keamanan / security pasar induk minasa maupa dan akibatnya saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

3. Dakwaan Penuntut Umum

Berdasarkan No. Registrasi perkara PDM-47/Sunggu/04/2016 tertanggal 23 Mei 2016, maka Jaksa Penuntut Umum mendakwa pelaku dalam bentuk dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Galang Listiyanto Jaya Bin Irwan Jaya pada hari senin tanggal 08 Februari 2016 sekitar jam 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016,

bertempat di Komp. Induk Minasa Maupa Kel.Tompobalang Kec.Sombaopu Kab.Gowa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa Galang Listiyanto Jaya Bin Irwan Jaya sekitar jam 07.00 wita berjualan ayam potong milik Amharkemudian sekitar jam 21.00 wita terdakwa istirahat dan langsung menuju ke tempat penjualan / lapak milik saksi korban Hasni Binti H.Tanri yang terletak di basement pasar Minasa Maupa. Selanjutnya terdakwa membuka terpal penutup lapak tersebut dan mengambil barang milik saksi korban tanpa ijin yaitu 2 (dua) bungkus coklat batang seberat 2 (dua) Kg, 2 (dua) bungkus coklat batang seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) Kgm 12 (dua belas) agar-agar merk burung wallet.
- b. Bahwa saksi Hendrawan dg Tula Bin Marhaban dg Nyomba yang berada dirumahnya di sms oleh saksi Ramli dg Gollo Bin

Rahman dg Lewa bahwa terdakwa berada di basement sedang mengambil barang jualan milik saksi korban kemudian saksi Ramli menuju ke pasar Minasa Maupa, pada saat saksi Hendrawan berada di pasar tersebut kemudian bertemu dengan saksi Ramli dan saksi Nasir yang berada di pos keamanan selanjutnya mereka bertiga ke basement dan melihat terdakwa sedang mengambil barang jualan milik saksi korban kemudian langsung menangkap terdakwa untuk diamankan di pos keamanan berserta barang milik saksi korban yang terdakwa sudah ambil selanjutnya datang anggota kepolisian dan membawa terdakwa ke resort Gowa.

- c. Bahwa selanjutnya saksi korban Hasni Binti H.Tanri diberitahuakan oleh Sitti Fatimah bahwa barang-barang saksi korban yang berada di lapaknya telah diambil oleh terdakwa Galang Listiyanto Jaya bin Irwan Jaya dimana Sitti Fatimah diberitahukan melalui telepon oleh petugas keamanan / security pasar induk Minasa Maupa dan akibatnya saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum menuntut agar majelis hakim memutuskan sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa Galang Listiyanto Jaya Bin Irwan Jaya bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHPidana.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Galang Listiyanto Jaya Bin Irwan Jaya oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
- c. Menyatakan barang bukti berupa;
2 (dua) bungkus coklat batang seberat 2 (dua) Kg
2 (dua) bungkus coklat batang seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) Kg
12 (dua belas) agar-agar merk burung wallet dikembalikan pada korban Hasni Binti H.Tanri
- d. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

5. Amar Putusan

Dalam perkara No. 91/Pid.B/2016/PN.Sgm, hakim memutuskan:

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa Galang Listiyanto Jaya Bin Irwan Jaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN”;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan Pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara;
- Menetapkan barang bukti yang terdiri atas:
 1. 2 (dua) bungkus coklat batangan seberat 2 (dua) Kg;
 2. 2 (dua) bungkus coklat batangan seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) Kg;
 3. 12 (dua belas) agar-agar merk burung wallet;
Dikembalikan kepada saksi Hasni Binti H.Tanri;
- Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

6. Analisis Penulis

Berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor PDM-47/Sunggu/04/2016 pasal yang dipersangkakan adalah pasal 363 ayat (1) ke- 3 yaitu tindak pencurian dengan pemberatan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam KUHPidana. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum juga telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan hanya saja ada unsur yang tidak terpenuhi pada pasal 363 ayat (1) ke- 3.

Dengan mengetahui fakta- fakta yang terungkap dipersidangan, maka pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, sebagaimana diketahui bahwa terdakwa diajukan didepan persidangan dengan dakwaan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur barang siapa

Bahwa pengertian “barang siapa” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat memepertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa Galang Listayanto Jaya bin Irawan Jaya yang dihadapkan dipersidangan ini yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah Galang Listiyanto Jaya bin Irawan Jaya

sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya masing-masing. Berdasarkan fakta diatas, maka unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- b. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan pula dengan keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta bahwa benar terdakwa Galang Listiyanto Jaya bin Irwan Jaya yang mengambil barang milik korban berupa 2 bungkus coklat batang 2 Kg, 2 bungkus coklat batang $\frac{1}{2}$ Kg, 12 dos agar-agar merk burung wallet di pasar tempat jualan korban tanpa seijin dari korban di kejadiannya hari senin tanggal 08 Februari 2016 sekitar jam 20.00 WITA tepatnya di kompleks pasar induk Minasa Maupa Kec. Sombaopu, Kab.Gowa berawal ketika terdakwa Galang Listiyanto Jaya bin Irwan Jaya sekitar jam 07.00 WITA berjualan ayam potong milik Amhar kemudian sekitar jam 21.00 WITA terdakwa istirahat dan langsung menuju ke tempat penjualan/ lapak milik saksi korban Hasni binti H.Tanri yang terletak di basement pasar Minasa Maupa. Selanjutnya terdakwa membuka terpal penutup

lapak tersebut dan mengambil barang milik saksi korban tanpa ijin.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- c. Unsur yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

- 1. Bahwa benar terdakwa Galang Listiyanto Jaya bin Irwan Jaya hari senin tanggal 08 Februari 2016 sekitar jam 20.00 WITA tepatnya di kompleks pasar induk Minasa Maupa kec.Sombaopu, Kab.Gowa terdakwa yang mengambil barang milik korban tanpa ijin berupa 2 bungkus coklat batang 2 Kg, 2 bungku coklat batang $\frac{1}{2}$ Kg, 12 dos agar-agar merk burung wallet di pasar tempat jualan korban tanpa seijin dari korban di kejadiannya hari senin tanggal 08 Februari 2016 sekitar jam 20.00 WITA tepatnya di kompleks pasar Induk Minasa Maupa Kec.Sombaopu, Kab.Gowa.

- 2. Bahwa tempat kejadian dalam perkara *a quo* bertempat di pasar Minasa Maupa, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dan di tempat tersebut tidak dihuni siang dan malam serta pasar tersebut tidak memiliki pagar atau tanda-tanda

lain yang berfungsi sebagai batas, oleh karenanya tempat kejadian tidak dapat dikualifikasikan sebagai rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi.

Dengan tidak terbuktinya unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dipersidangan maka terdakwa tidak dapat didakwa pasal 363 ayat (1) ke-3 yaitu pencurian dengan pemberatan.

B. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan pidana perkara putusan Nomor: 91/Pid.B/2016/PN.Sgm. pasca dikeluarkannya peraturan MARI No. 2 tahun 2012 tentang batas penyelesaian tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHPidana

1. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana

Setelah hakim menarik fakta-fakta dalam proses persidangan yang merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, fakta-fakta yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi, waktu kejadian, dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana dilakukan. Dan juga melihat bagaimana akibat yang ditimbulkan serta memperhatikan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus serta mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan

meringankan. Maka dalam Amar Putusan, hakim memutuskan dan menjatuhkan sanksi berupa:

1. Menyatakan Terdakwa Galang Listiyanto Jaya Bin Irwan Jaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan Pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti yang terdiri atas:
 - a) 2 (dua) bungkus coklat batangan seberat 2 (dua) Kg;
 - b) 2 (dua) bungkus coklat batangan seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) Kg;
 - c) 12 (dua belas) agar-agar merk burung wallet;Dikembalikan kepada saksi Hasni Binti H.Tanri;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dan menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut diatas :

1. Hakim mempertimbangkan keberadaan terdakwa dalam tahanan sejak tanggal 8 Mei 2013;

2. Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum;
3. Hakim mempertimbangkan pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar hukumannya diringankan dengan alasan terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
4. Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan sebagaimana dalam surat dakwaan No.Reg. Perk: PDM-47/Sunggu/04/2016 tanggal 07 April 2016 yang melanggar pasal sebagaimana dalam dakwaan pasal 362 dan 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana
5. Menimbang, bahwa dipersidangan jaksa penuntut umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa 2 (dua) bungkus coklat batangan seberat 2 (dua Kg, 2 (dua) bungkus coklat batangan seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) Kg, 12 (dua belas) agar-agar merk Brung Wallet yang dikembalikan kepada saksi Hasni binti H.Tanri
6. Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa;

Terdakwa Galang Listiyanto Jaya bin Irwan Jaya di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Kejadiannya pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Kompleks

Pasar Minasa Maupa, Kecamatan Somba Opu
Kabupaten Gowa;

- b. Kejadiannya berawal ketika terdakwa sedang istirahat menjual ayam sekitar pukul 19.30 WITA, kemudian terdakwa ke tempat jualan saksi korban dan langsung membuka terpal penutup jualan dan mengambil coklat batang 3 (tiga) Kg serta agar-agar 12 (dua belas) dos, kemudian memasukkan barang-barang tersebut ke dalam kantong plastic, namun tiba-tiba datang Security Pasar menangkap terdakwa dan membawa terdakwa ke Pos Security, tidak lama kemudian datang anggota Polres Gowa menjemput terdakwa dan membawa ke Polres Gowa;
- c. Terdakwa timbul niat mengambil barang jualan milik saksi korban pada saat menjelang magrib;
- d. Terdakwa mengambil barang jualan saksi korban dengan tujuan untuk dijual kembali dan dari hasil penjualan terdakwa hendak menggunakan membeli rokok;
- e. Terdakwa mengambil barang jualan milik saksi korban tanpa seizin saksi korban

- f. Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai barang yang diambil oleh terdakwa pada saat kejadian.
7. Menimbang bahwa keterangan saksi dan keterangan terdakwa saling menunjukkan kesesuaian yang didukung pula oleh barang bukti yang ada, sehingga melahirkan kesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana “Pencurian”
- a. Saksi Hasni binti H.Tanri dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - a) Kejadiannya pada hari senin tanggal 08 Februari 2016 sekitar Pukul 20.00 WITA bertempat di Kompleks Pasar Minasa Maupa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;
 - b) Saksi kehilangan barang-barang jualan berupa 2 (dua) bungkus coklat batangan seberat 2 (dua) Kg, 2 (dua) bungkus coklat batangan seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) Kg dan 12 (dua belas) bungkus agar-agar merk Burung Wallet;
 - c) Barang-barang jualan korban yang hilang tersebut, saksi simpan di pasardi tempat jualan saksi yang ditutupi dengan terpal dan diikat dengan tali;

- d) Saksi tidak melihat kejadiannya Karena pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah, saksi mengetahui dari teman saksi yang bernama Sitti Fatimah datang ke rumah saksi memberitahukan kalau barang-barang jualan saksi telah diambil oleh terdakwa dan terdakwa ditangkap langsung oleh Security Pasar;
- e) Saksi sudah dua kali kehilangan barang jualan dan terakhir sekitar 2 (dua) bulan lalu;
- f) Saksi mengalami kerugian kurang lebih 1 (satu) juta rupiah atas kejadian ini;
- g) Selain saksi banyak lagi penjual lain yang pernah kehilangan barang jualan di pasar dan setelah terdakwa ditangkap sudah tidak pernah lagi ada yang kehilangan barang jualan dipasar;
- h) Selain Sitti Fatimah, Security juga langsung datang kerumah saksi dan memberitahukan kalau saksi kehilangan barang jualan;
- i) Terdakwa mengambil barang-barang jualan milik saksi tanpa seizin dan sepengetahuan saksi sebagai pemilik;

- j) Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan mengatakan barang-barang jualan itulah yang hilang;
 - k) Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan;
- b. Saksi Muh. H. Nasir bin Basodeng Daeng Ngalle, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- a) Kejadiannya pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Kompleks Pasar Minasa Maupa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;
 - b) Setahu saksi yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah saksi Hasni;
 - c) Saksi mengetahui kejadiannya bahwa terdakwa yang mengambil barang-barang jualan saksi korban karena saksi adalah Kepala Keamanan Pasar Minasa Maupa yang menangkap terdakwa pada saat kejadian dan saksi baru kali ini melakukan penangkapan;
 - d) Barang-barang jualan saksi korban yang diambil oleh terdakwa adalah berupa 2 (dua) bungkus coklat batangan seberat 2 (dua) Kg, 2 (dua)

bungkus coklat batang seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) Kg
dan 12 (dua belas) bungkus agar-agar merk
burung wallet;

- e) Saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah penjual ayam di pasar Minasa Maupa;
- f) Saksi tidak mengetahui tujuan terdakwa mengambil barang-barang jualan milik saksi korban;
- g) Saksi memperkirakan kerugian korban atas kejadian tersebut sekitar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- h) Saksi bersama dua orang teman yang melihat langsung pada saat terdakwa mengambil barang-barang jualan milik saksi korban;
- i) Setahu saksi terdakwa hanya seorang diri yang mengambil barang-barang jualan milik saksi korban
- j) Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan mengatakan barang bukti tersebut milik saksi korban Hasni;
- k) Terhadap keterangan saksi terdakwa memebenarkan.

c. Saksi Ramli Daeng Gollo bin Rahman Daeng Lewa dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- a) Saksi mengetahui terdakwa dihadapkan di persidangan karena pada hari senin tanggal 08 Februari 2016 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di kompleks pasar Minasa Maupa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, terdakwa telah mengambil barang jualan milik saksi Hasni berupa 2 (dua) bungkus coklat batangan seberat 2 (dua) Kg, 2 (dua) bungkus coklat batang seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) Kg dan 12 (dua belas) bungkus agar-agar merk wallet;
- b) Saksi mengetahui bahwa terdakwa yang mengambil barang jualan saksi Hasni tersebut karena saksi adalah security di pasar dan pada waktu kejadian saksi sedang berpatroli dan melihat terdakwa berada di lapak saksi korban Hasni dan sedang mengambil barang jualan saksi Hasni;
- c) Saksi melihat terdakwa mengambil barang jualan milik saksi korban Hasni dari jarak 10 (sepuluh) meter dan pada malam itu ada cahaya

lampu penerangan, maka saksi melihat wajah terdakwa;

- d) Pada saat saksi melihat terdakwa mengambil barang jualan saksi korban Hasni, saksi tidak langsung mendekati terdakwa, tetapi saksi langsung menghubungi korlap melalui sms dan tidak lama kemudian korlap Muh. Nasir datang ke tempat kejadian, selanjutnya saksi bertiga melihat terdakwa membawa barang saksi korban, kemudian menangkap dan membawa terdakwa ke Pos Security;
- e) Setahu saksi cara terdakwa mengambil barang jualan saksi korban, kemudian mengambil barang jualan saksi korban;
- f) Saksi melihat terdakwa hanya sendiri mengambil barang jualan milik saksi korban;
- g) Saksi tidak melihat tempat jualan saksi korban tidak ada yang rusak karena hanya ditutupi terpal dan terpalpenutup langsung dibuka oleh terdakwa untuk mengambil barang tersebut;
- h) Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

2. Analisa Penulis

Berdasarkan hasil penelitian penulis, baik melalui wawancara terhadap hakim yang terkait dalam perkara dalam tulisan ini, maupun melalui studi kepustakaan dari dokumen-dokumen yang terkait. Berkaitan dengan perkara yang penulis bahas, penulis telah melakukan wawancara dengan Hakim yang menangani perkara ini yaitu Hakim Ilham SH pada tanggal 13 Januari 2016 untuk mengetahui apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa menerangkan bahwa :

Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHPidana karena tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 363 pencurian berat ayat (1) ke-3 seperti yang dikedakwakan oleh penuntut umum melainkan memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 362 pencurian biasa dengan ancaman pidana yang dijatuhkan adalah 5 bulan penjara dan membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

analisa penulis adalah hakim sudah seharusnya mempertimbangkan banyak hal sebelum menjatuhkan pidana. Misalnya fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta hal-hal lain yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam menjatuhkan pidana hakim harus memperhatikan asas legalitas. Menurut Machteld Boot ada empat syarat yang termasuk dalam asas legalitas. Pertama, *prinsip nullum crimen, noela poena sine lege pravia* yang artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa uu

sebelumnya. Kedua, prinsip *nullum crimen, noela poenasine lege scripta* yang artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa uu tertulis. Ketiga, prinsip *nullum crime, nulla poena sine lege certa* yang artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa aturan uu yang jelas. Keempat, prinsip *nullum crimen, noela poena sine lege stricta* yang artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa uu yang ketat³⁵.

Pada prinsip *nullum crime, nulla poena sine lege certa* yang artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa aturan uu yang jelas bermakna bahwa rumusan perbuatan pidana harus jelas, agar tidak bersifat multitafsir sehingga dapat membahayakan kepastian hukum. Ketika hakim akan menjatuhkan pidana sebelumnya hakim melakukan proses pentautan antara apa faktanya dan apa aturannya, aturan ini dibangun oleh unsur-unsur³⁶.

Pada Pasal 362 memiliki unsur yaitu; mengambil, melawan hukum, dan memiliki barang bagi diri sendiri. Ketiga unsur ini telah terbukti dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Pencurian terbagi atas; pencurian biasa (Pasal 362), pencurian berat (Pasal 363), pencurian ringan (Pasal 364), pencurian dengan kekerasan

³⁵ Eddy O.S Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, (Erlangga, Jakarta, 2009), hlm 4

³⁶ Ibid, hlm 5

(Pasal 365), pencurian dalam keluarga (Pasal 367) yang berarti adanya kemungkinan adanya pencurian lain selain pencurian biasa. Adanya hal yang meringankan maupun yang memberatkan merupakan salah satu unsur suatu pencurian dapat digolongkan menjadi pencurian jenis lain. Dalam perkara ini terdakwa Galang Listiyanto Jaya bin Irwan Jaya telah terbukti melakukan pencurian dan telah memenuhi unsur pada Pasal 362 KUHPidana seperti yang telah diputuskan oleh hakim. Namun menurut penulis, pidana yang paling tepat dikaitkan dengan perbuatan terdakwa dengan pasal yang ada yaitu Pasal 364 karena barang yang dicuri oleh terdakwa jika ditaksir kerugiannya dibawah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Pada peraturan MARI No. 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHPidana yang pada intinya memerintahkan kepada aparat hukum untuk mengaktifkan kembali ketentuan pasal 364 KUHPidana khususnya dalam memproses sebuah kasus pencurian ringan. Salah satu unsur yang terdapat pada pasal 364 KUHPidana tidak hanya sebatas pada nilai nominal barang yang dicuri yakni tidak lebih dari Rp. 125,00 (seratus dua puluh lima rupiah) yang dalam Peraturan MARI No. 2 Tahun 2012 sudah dilipatgandakan sepuluh ribu kali lipat menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun juga bahwa pencurian tersebut asal

saja tidak dilakukan di dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya.

Perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur yang ada pada Pasal 364 yaitu barang yang dicuri jika ditaksir kerugiannya dibawah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak terbukti melakukan tindakannya dalam sebuah rumah atau pun pekarangan yang ada rumahnya. Meskipun sudah tepat perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 362 Pencurian Biasa namun perbuatan terdakwa memiliki unsur meringankan dan unsur yang meringankan tersebut harus dipertahankan dan dijadikan sebagai dasar pembuktian.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian, dan penjelasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana Pasal 362 terhadap tindak pidana materiil pada putusan No. 91/Pid.B/2016/PN.SGM tentang pencurian biasa penulis merasa kurang setuju mengingat fakta-fakta dipersidangan menunjukkan adanya unsur meringankan yaitu perbuatan terdakwa jika ditaksir kerugiannya hanya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan jumlah batasan tindak pidana yang telah di perbarui oleh peraturan MARI yaitu dari Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) dilipatgandakan menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), selain itu terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatannya dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang ada rumahnya.
2. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan No. 91/Pid.B/2016/PN.SGM dinilai penulis Hakim kurang cermat dalam menjatuhkan pidana karena tidak mempertimbangkan hal yang meringankan bagi terdakwa

yaitu jika ditaksir kerugian korban hanya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan jumlah batasan tindak pidana yang telah di perbarui oleh peraturan MARI yaitu dari Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) dilipatgandakan menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Yang seharusnya terdakwa dipidana dan diputus Pasal 364 pencurian ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya 3 bulan.

B. SARAN

Berikut beberapa saran yang penulis dapat berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Majelis hakim sudah seharusnya memperhatikan fakta-fakta yang terbukti di persidangan. Mencermati unsur-unsur yang meringankan maupun yang memberatkan sehingga terdakwa dapat diputus dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.
2. Masyarakat memiliki peran besar dalam terjadinya suatu kejahatan, maka masyarakat yang dibantu dengan aparat hukum harus bersama-sama mencegah perbuatan-perbuatan seperti ini untuk tidak terjadi kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Imam Syaukani, A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar politik hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006
- Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 1999
- Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2007
- Jimly Asshidiqqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Angkasa, Bandung, 1996
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-pokok hukum Pidana*, storia Grafika, Jakarta, 2002
- Wiryo Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT.ERESCO, Jakarta, 2002
- Poernomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2011
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010
- R.Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1984
- M.Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003
- Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2014

H.A.K. MOCH ANWAR (DADING), *Hukum pidana bagian khusus (KUHPidana buku II) jilid I*, penerbit alumni, Bandung, 1986

Eddy O.S Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2009

Peraturan Perundang-undangan

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)*, Politeia, Bogor, 1995

Sumber Lainnya

[http://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/perma no-2-tahun-2012-tentang-penyesuaian-batasan-tindak-pidana-ringan-dan-jumlah-denda-dalam-kuhp.pdf](http://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/perma%20no-2-tahun-2012-tentang-penyesuaian-batasan-tindak-pidana-ringan-dan-jumlah-denda-dalam-kuhp.pdf), diakses pada 7 Oktober 2016



PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA

JALAN USMAN SALENGKE NO. 103 TELP. (0411) 861129-861089
SUNGGUMINASA - KABUPATEN GOWA 92111

SURAT KETERANGAN

Nomor : W22.U3 / 13 / HK / I / 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, menerangkan bahwa :

N a m a	: Vidya Nur Fitrah
Nomor Induk Mahasiswa	: B11113517
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian	: Hukum Pidana
Jenis kelamin	: Perempuan
Fakultas/Universitas	: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
A l a m a t	: Jl. Mappala Blok E 24/A3 No.7 Makassar.

Telah melakukan Penelitian pada Kantor Pengadilan Negeri Sungguminasa, dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul " *TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN PASCA DITERBITKANNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHPIDANA* " (Studi Kasus pada Pengadilan Negeri Sungguminasa No. Perkara 91/PID.B/2016/ PN SGM).

Demikian surat ini dibuat dan diberikan kepada Peneliti tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Sungguminasa, 18 Januari 2017.

PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA
PANITERA MUDA HUKUM

Abd. Latif SH.
Abd. Latif, SH.

NIP. 19650920 199003 1 002

Tembusan :

- Arsip

KEJAKSAAN NEGERI GOWA

SURAT KETERANGAN

Nomor : B - 32 / R.4.14 / Cu.1/ 01/ 2017

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUH. SYUKUR, SH.
NIP : 19720505 200003 1 003
Pangkat / Gol. Ruang : Jaksa Muda (III/d)
Jabatan : Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan
Negeri Gowa

Menyatakan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama : VIDYA NUR FITRAH
No. Pokok : B11113517
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas : Hasanuddin (UNHAS)
Alamat : Jl. Mappala Blok E 24/A3 No.7 Makassar

Benar telah melakukan penelitian pada bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Gowa dalam rangka penyusunan dan penulisan Skripsi dengan judul "TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN PASCA DITERBITKANNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHPIDANA" (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 91/PID.B /2016/PN.SGM).

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Sungguminasa, 12 Januari 2017

An. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GOWA
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM



MUH. SYUKUR, SH

JAKSA MUDA NIP. 19720505 200003 1 003